

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP KRISIS PRODUK PANGAN GLOBAL**Mohammad Hangga Afandi**
Universitas Sunan Giri Surabaya

Correspondence

Email: hanggaafandi@gmail.com

No. Telp: 082228958092

Submitted 15 Juli 2024

Accepted 20 Juli 2024

Published 21 Juli 2024

ABSTRACT

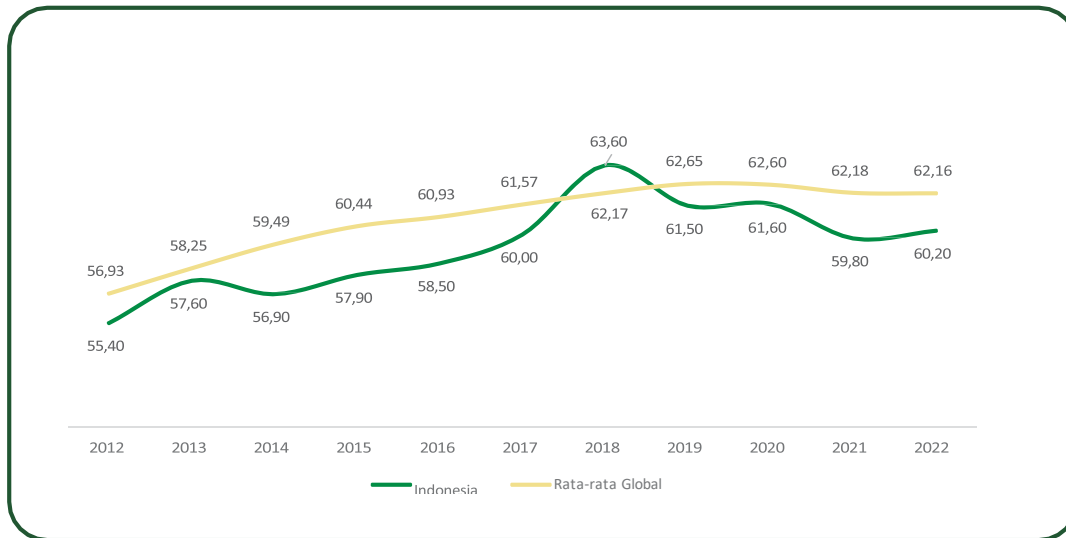
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis produk pangan global, menggunakan metode penelitian normatif. Metode ini berfokus pada analisis peraturan dan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam merespon tantangan global terkait ketersediaan dan keamanan pangan. Dalam konteks global yang dinamis, krisis pangan menjadi isu yang sangat kritis, terutama bagi negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan yang telah diterapkan serta implikasi hukum dan sosialnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia yang berbasis pada ketahanan pangan nasional, diversifikasi pangan, dan dukungan terhadap produksi lokal memiliki peran penting dalam mengatasi krisis pangan. Kebijakan ini juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peningkatan koordinasi antar lembaga dan penyesuaian regulasi dengan kondisi global yang terus berubah sangat penting untuk menghadapi krisis pangan di masa depan.

Kata kunci: Globalisasi; krisis pangan; kesejahteraan masyarakat**Pendahuluan**

Krisis produk pangan global telah menjadi perhatian utama dalam dinamika ekonomi global, khususnya bagi negara-negara dengan populasi besar seperti Indonesia. Tantangan terhadap ketersediaan dan keamanan pangan memerlukan respons yang cepat dan tepat dari pemerintah untuk memastikan ketahanan pangan nasional. Dalam tahun 2023, konflik, masalah ekonomi, perubahan iklim ekstrem, dan kenaikan harga pupuk menyebabkan bencana pangan di seluruh dunia. Menurut Program Pangan Dunia (WFP), lebih dari 333 juta orang di 78 negara menghadapi kerawanan pangan tingkat akut. Jumlah ini meningkat hampir 200 juta orang dibandingkan dengan tingkat kerawanan pangan sebelumnya sebelum pandemi Covid-19. WFP menyatakan bahwa sejumlah faktor yang berbeda bertanggung jawab atas krisis pangan saat ini. Kelaparan masih menjadi penyebab terbesar. Sebanyak 70% kelaparan di dunia tinggal di wilayah yang terdampak perang dan konflik. (Jawahir Gustav Rizal, 2024)

Berbagai studi menyoroti perlunya kebijakan yang efektif dalam mengatasi krisis ini, dengan fokus pada kebijakan ketahanan pangan, diversifikasi pangan, dan dukungan terhadap produksi lokal sebagai solusi yang potensial. Ir. Jaka Widada, M.P., Ph.D., pengamat pertanian, mengatakan bahwa iklim yang tidak menentu, hujan yang sangat tinggi, bencana alam, dan faktor lain menunjukkan tanda-tanda krisis pangan. Akibatnya, petani mengalami kegagalan panen karena banjir atau kekeringan, serta gagal panen karena penyakit dan ledakan hama. (agungnoe, 2022)

Dalam laporan Global Report on Food Crises (GRFC) tahun 2021, setidaknya hamper 193 juta orang mengalami kerawanan pangan akut dan membutuhkan bantuan pangan mendesak di 53 negara (FSIN 2020). Adanya perang yang berlangsung di Ukraina turut mengganggu rantai pasokan dan harga terhadap biji-bijian, pupuk, dan energi. Selain itu pemulihan dari pandemic COVID-19 yang belum usai serta perubahan iklim global telah menyebabkan terganggunya rantai pasok dan distribusi pangan suatu negara.



Gambar Indeks Ketahanan Pangan Global (GFSI), 2012-2022

Ketika semua orang di setiap waktu memiliki akses baik secara fisik maupun ekonomi terhadap makanan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan mereka, serta hidup aktif, dan sehat, makapada saat itu ketahanan pangan bisa diartikan tercapai (FAO, 1996). Indeks Ketahanan Pangan Global (Global Food Security Index, atau GFSI) Indonesia menunjukkan tren yang positif meskipun masih di bawah rata-rata global, menurut Economist Impact (2022). Pada tahun 2018, skor tertingginya adalah 63,60, menempati peringkat ke-58 dari 113 negara. Setelah itu, hingga tahun 2022, skor GFSI Indonesia menurun. Indonesia berada di peringkat ke-63 dengan skor 60,2, sementara ketahanan pangan Indonesia di Asia Tenggara menduduki posisi ke-4, hanya di belakang Vietnam. Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, indeks ketahanan pangan global Indonesia ditargetkan berada pada skor 95,20. Namun, sampai 2022, indeks tersebut tetap sebesar 60,20. (Awwaliyah, 2023)

Diversifikasi pangan global yang rendah memperburuk ketahanan pangan global. Padi-padian (cereals), gula, dan minyak nabati adalah produk utama hasil pertanian di seluruh dunia. Jagung, beras, dan gandum menyumbang 90% produksi jenis padi-padian. Hal ini menunjukkan bahwa komoditas pangan tertentu sangat digantungkan di seluruh dunia.. (Romauli Panggabean, 2024)

Artikel ini memberikan kontribusi dengan menggabungkan analisis normatif terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespon krisis produk pangan global. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih menyoroti aspek ekonomi semata, penelitian ini menekankan analisis terhadap regulasi dan kebijakan yang diterapkan untuk mengatasi tantangan ketersediaan dan keamanan pangan di tingkat nasional.

Permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis produk pangan global, serta sejauh mana efektivitas kebijakan tersebut dalam memastikan ketahanan pangan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah Indonesia dalam merespon krisis produk pangan global, dengan fokus pada evaluasi keefektifan kebijakan yang diterapkan dan implikasi hukum serta sosialnya.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu pendekatan analisis kebijakan untuk mengkaji respons pemerintah Indonesia terhadap krisis produk pangan global, mirip dengan metode yang sering digunakan oleh berbagai ahli dalam bidang studi kebijakan publik. Analisis kebijakan publik merupakan studi tentang pemahaman atau pengembangan kebijakan. Oleh karena itu, selain perumusan kebijakan, analisis publik juga dapat dilakukan untuk memahami dengan mudah kebijakan publik seperti apa yang dipraktikkan. Hal ini disebabkan oleh sejumlah kebijakan publik yang dinilai kurang memadai, karena banyak yang tidak menyelesaikan permasalahan politik dan malah menimbulkan permasalahan baru. (Dr. Harbani Pasolong, 2019)

Metode ini melibatkan pengumpulan dan analisis dokumen kebijakan, evaluasi implementasi kebijakan yang ada, serta penilaian terhadap dampak kebijakan terhadap isu yang ditangani, dalam hal ini adalah krisis produk pangan global. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana kebijakan publik diputuskan, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks spesifik krisis pangan global.

Dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan, penelitian ini berupaya untuk memberikan wawasan yang mendalam tentang respons pemerintah Indonesia terhadap krisis produk pangan global, dengan fokus pada efektivitas kebijakan yang telah diimplementasikan dan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa depan.

Hasil dan Pembahasan

A. Beberapa undang-undang dan peraturan yang relevan dengan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis produk pangan global, berfokus pada ketersediaan dan keamanan pangan

Undang-Undang Terkait Ketahanan Pangan

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan:

Tujuan: Mengatur penyelenggaraan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional yang menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, bergizi, berkualitas, dan merata di seluruh wilayah Indonesia.

Isi Penting: UU ini mencakup pengaturan tentang produksi, distribusi, konsumsi, dan pengawasan pangan. Juga menekankan pentingnya diversifikasi pangan dan penguatan produksi lokal.

2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani:

Tujuan: Memberikan perlindungan hukum dan pemberdayaan kepada petani untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas mereka.

Isi Penting: Memuat ketentuan tentang pemberian insentif, akses terhadap teknologi, pelatihan, serta perlindungan terhadap risiko usaha tani.

Peraturan Pemerintah Terkait Keamanan Pangan

3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan:

Tujuan: Mengatur tentang standar keamanan pangan untuk melindungi konsumen dari pangan yang tidak aman dan berbahaya.

Isi Penting: Mencakup pengawasan dan pengendalian kualitas pangan dari produksi hingga distribusi, termasuk standar gizi yang harus dipenuhi oleh produk pangan.

4) Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan Nasional:

Tujuan: Mengatur kebijakan strategis dalam rangka mencapai kemandirian dan kedaulatan pangan.

Isi Penting: Meliputi strategi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan stabilisasi harga pangan, serta penguatan kelembagaan pangan nasional.

Koordinasi dan Penyesuaian Regulasi

- 5) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Gerakan Diversifikasi Pangan:

Tujuan: Mendorong diversifikasi pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada beras dan gandum.

Isi Penting: Mengatur program-program dan kegiatan untuk mengembangkan serta mempromosikan konsumsi pangan lokal yang beragam.

- 6) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penguatan Produksi dan Ketahanan Pangan Nasional:

Tujuan: Menginstruksikan langkah-langkah strategis kepada kementerian dan lembaga terkait untuk memperkuat produksi dan ketahanan pangan.

Isi Penting: Menekankan peningkatan produksi pangan utama, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, dan perbaikan sistem distribusi pangan.

B. Penelitian ini mengungkapkan beberapa temuan penting terkait kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis produk pangan global.

Temuan utama penelitian ini meliputi:

1. **Ketahanan Pangan Nasional:** Kebijakan yang difokuskan pada ketahanan pangan nasional menunjukkan hasil positif dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat Indonesia. Ini termasuk kebijakan peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan infrastruktur pertanian, dan penyediaan subsidi bagi petani untuk mendukung produksi.
2. **Diversifikasi Pangan:** Pemerintah telah menerapkan kebijakan diversifikasi pangan untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis komoditas pangan tertentu. Diversifikasi ini mencakup pengembangan berbagai jenis tanaman pangan lokal yang dapat tumbuh di berbagai kondisi iklim dan tanah di Indonesia.
3. **Dukungan terhadap Produksi Lokal:** Kebijakan yang mendukung produksi lokal, seperti pemberian insentif kepada petani, pengembangan teknologi pertanian, dan pelatihan bagi petani, telah membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil pertanian.
4. **Stabilitas Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat:** Kebijakan pangan yang diterapkan oleh pemerintah juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan harga yang stabil, masyarakat dapat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka.
- 5.

C. Pembahasan hasil penelitian ini mengacu pada beberapa aspek kunci dari kebijakan pangan yang telah diterapkan oleh pemerintah Indonesia

| No. | Aspek Kebijakan | Kebijakan yang Diterapkan | Efektivitas | Implikasi Hukum | Implikasi Sosial |
|-----|---------------------------|---|--|--|---|
| 1. | Ketahanan Pangan Nasional | Peningkatan produksi pangan lokal, pengembangan infrastruktur | Peningkatan produksi pangan lokal dan stabilitas harga pangan. | Memperkuat regulasi tentang ketahanan pangan | Masyarakat memiliki akses pangan yang cukup dan harga |

| | | | | | |
|----|--|--|---|---|--|
| | | pertanian, subsidi bagi petani | | nasional dan dukungan hukum terhadap petani lokal. | terjangkau, mengurangi risiko kelaparan dan malnutrisi. |
| 2. | Diversifikasi Pangan | Pengembangan berbagai jenis tanaman pangan lokal, penelitian dan pengembangan varietas tanaman tahan iklim ekstrem | Mengurangi ketergantungan pada beberapa jenis komoditas pangan, meningkatkan ketahanan pangan terhadap perubahan iklim dan cuaca ekstrem. | Perlu penyesuaian regulasi untuk mendukung diversifikasi pangan dan perlindungan varietas lokal. | Meningkatkan keberagaman sumber pangan masyarakat, memperkaya nutrisi, dan meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga. |
| 3. | Dukungan terhadap Produksi Lokal | Insentif bagi petani, pengembangan teknologi pertanian, pelatihan bagi petani | Peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, keberlanjutan produksi pangan lokal. | Penguatan regulasi untuk memberikan insentif dan perlindungan terhadap petani lokal serta pengembangan teknologi. | Peningkatan kesejahteraan petani, stabilitas ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas hidup di pedesaan. |
| 4. | Koordinasi Antar Lembaga | Peningkatan koordinasi antara kementerian dan lembaga terkait dalam merespons krisis pangan global | Efektivitas dalam implementasi kebijakan, pengurangan tumpang tindih kebijakan, respons cepat terhadap krisis pangan. | Perlu penyesuaian regulasi untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antar lembaga. | Memastikan respons yang cepat dan tepat dalam menghadapi krisis pangan, mengurangi dampak negatif terhadap masyarakat. |
| 5. | Penyesuaian Regulasi dengan Kondisi Global | Penyesuaian regulasi sesuai dengan dinamika global, pembaruan kebijakan berdasarkan analisis terbaru tentang kondisi pangan global | Kebijakan yang relevan dan adaptif terhadap perubahan kondisi global, meningkatkan ketahanan pangan nasional. | Penyesuaian regulasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitas kebijakan. | Kebijakan yang responsif terhadap perubahan global, menjaga stabilitas pangan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dalam |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--------------------------|
| | | | | | menangani krisis pangan. |
|--|--|--|--|--|--------------------------|

Kebijakan ketahanan pangan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia terbukti efektif dalam memastikan ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Ini tercermin dari peningkatan produksi pangan lokal dan stabilitas harga pangan di pasar domestik. Dengan adanya diversifikasi pangan merupakan strategi penting dalam menghadapi krisis pangan global. Adapun juga dengan mengembangkan berbagai jenis tanaman pangan lokal, Indonesia dapat mengurangi ketergantungan pada impor pangan dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Diversifikasi juga membantu dalam mengurangi risiko kegagalan panen akibat perubahan iklim dan kondisi cuaca ekstrem.

Kebijakan yang mendukung produksi lokal memainkan peran kunci dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Pemberian insentif, pengembangan teknologi pertanian, dan pelatihan bagi petani telah memberikan hasil positif dalam meningkatkan hasil panen dan kualitas produk pertanian. Kebijakan tersebut diterapkan oleh pemerintah tidak hanya berdampak pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan harga pangan yang stabil dan terjangkau, masyarakat memiliki akses yang lebih baik terhadap pangan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga dalam menghadapi krisis pangan global. Selain itu, penyesuaian regulasi dengan kondisi global yang terus berubah sangat penting untuk memastikan kebijakan yang diterapkan tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang ada.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah Indonesia berperan penting dalam mengatur kebijakan pangan yang bertujuan untuk mengatasi krisis pangan global. Melalui undang-undang dan peraturan tersebut, pemerintah berupaya meningkatkan ketahanan pangan nasional, diversifikasi pangan, dan dukungan terhadap produksi lokal. Kebijakan ini tidak hanya berkontribusi pada stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga memerlukan peningkatan koordinasi antar lembaga dan penyesuaian regulasi dengan kondisi global yang terus berubah.

Saran

Pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar kementerian dan lembaga yang terkait dengan ketahanan pangan. Pembentukan badan koordinasi khusus yang bertugas mengintegrasikan kebijakan dan program ketahanan pangan dapat membantu mengurangi tumpang tindih kebijakan dan meningkatkan responsivitas terhadap krisis pangan. Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan infrastruktur pertanian, memberikan insentif kepada petani, dan meningkatkan kapasitas penyimpanan pangan. Diharapkan kebijakan pemerintah Indonesia dalam menangani krisis produk pangan global dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga dapat menjamin ketahanan pangan, stabilitas ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Referensi

agungnoe. (2022, Juni 22). *Pakar Pertanian : Krisis Pangan Sudah Terasa*. Retrieved from ugm.ac.id: <https://ugm.ac.id/id/berita/22620-pakar-pertanian-krisis-pangan-sudah-terasa/>

Awwaliyah, B. D. (2023). *Analisis Isu Terkini 2023*. Jakarta: BADAN PUSAT STATISTIK.



-
- Dr. Harbani Pasolong, M. (2019). *TEORI ADMINISTRASI PUBLIK*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Jawahir Gustav Rizal, K. E. (2024, 01 17). *Krisis Pangan Global dan Tantangan yang Dihadapi Indonesia*. Retrieved from kompas: https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/01/17/193000382/krisis-pangan-global-dan-tantangan-yang-dihadapi-indonesia#google_vignette
- Romauli Panggabean, S. N. (2024, April 22). *Membangun Ketahanan Pangan Indonesia 2030*. Retrieved from wri-indonesia: <https://wri-indonesia.org/id/wawasan/membangun-ketahanan-pangan-indonesia-2030>